

4. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, DPMPTSP, Sekretariat DPRD, kecamatan dan kelurahan se Kabupaten Wonosobo.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp 130.929.837.268,-** atau **6,53%** dari total alokasi APBD Tahun 2017 yang berjumlah **Rp 2.000.613.704.761,-**. **Alokasi untuk urusan Administrasi Pemerintahan dapat terealisasi sebesar Rp 113.281.439.386,- atau 86,52%.** Adapun program dan alokasi anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.F.4..1
Alokasi Program Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	44.564.471.124	40.134.606.330
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.998.426.561	17.402.911.203
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.429.549.563	17.272.585.456
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	452.495.000	438.778.050
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	253.000.000	239.565.000
5.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	3.881.000.000	3.287.742.420
6.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	395.000.000	381.120.339
7.	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	540.000.000	520.809.500
8.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	365.000.000	354.055.700
9.	Program Penataan Kelembagaan	250.000.000	237.038.662
B	Belanja Tidak langsung	86.365.366.144	73.146.833.056
	Jumlah total	130.929.837.268	113.281.439.386

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

b. Alokasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi pemerintahan di perangkat daerah Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan 15 kecamatan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan; Penyelesaian Pekerjaan Kantor; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan ketentaraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor; serta Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3) Program peningkatan disiplin aparatur

Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional maka dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi ASN di Bagian Umum dan Humas Setda serta Sekretariat DPRD. Pengadaan pakaian dinas di Sekretariat DPRD dilaksanakan untuk memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan amanat undang-undang.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketrentaman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum di 15 kecamatan. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum digunakan sebagai wadah untuk koordinasi masalah-masalah kewilayahan di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pengentasan kemiskinan.

5) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme lembaga perwakilan rakyat daerah maka pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Penjaringan aspirasi masa reses, Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian anggota DPRD, General Cek up anggota DPRD dan Keluarga, Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya DPRD, Pengadaan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD, Penyediaan tenaga ahli dan tim ahli, Pengadaan Buku Kerja DPRD, Pengembangan minat dan budaya

baca, Penyusunan Buku Kinerja DPRD, Apraisal Tunjangan Transportasi, dan Penyediaan Jasa Pengemudi Bagi Pimpinan DPRD.

Kegiatan reses dilaksanakan pada bulan Mei dan November 2017 oleh semua anggota DPRD baik unsur pimpinan maupun anggota pada daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diharapkan anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Kegiatan lainnya yaitu Pengadaan Buku Perpustakaan DPRD untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan penentuan kebijakan. Workshop DPRD dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, P3M STPMD"APMD" Yogyakarta, LPPM Universitas 1 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Adapun materi yang digunakan sebagai bahan workshop yaitu: LKPJ sebagai parameter kinerja pemerintah daerah, Problematika Peran DPRD dalam Mengelola Keuangan Daerah, Penyusunan APBD 2018, Penyusunan Indikator Kinerja pada DPA Sekretariat DPRD Tahun 2018 dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pok dan Fungsi DPRD, Inovasi Daerah dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah.

6) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dijabarkan dalam beberapa kegiatan, antara lain : Revitalisasi/penguatan sistem informasi layanan publik bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, Revitalisasi/penguatan sistem informasi layanan publik bidang pemerintahan desa, Pengadaan Bandwidth LPSE, Fasilitasi Sarana dan Prasarana PATEN, Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dan Administrasi Kependudukan.

Revitalisasi/penguatan sistem informasi layanan publik bidang penanaman modal dan perizinan terpadu diwujudkan dalam pembuatan sistem informasi. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat memberikan informasi dan gambaran tentang produk perizinan antara lain : Izin Tempat Usaha / Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pemasangan Reklame, Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian (IPPT), Surat Izin Penggunaan Alun-alun, Izin Usaha Industri (IUI), Izin Operasional Pangkalan LPG 3 kg, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Penggilingan Padi, Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Izin Usaha Keramba Apung, Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA), Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Makam Keluarga, Izin Perdagangan Minuman Beralkohol, Izin Operasional Warnet, Izin Lokasi, Izin Prinsip, dan Izin Usaha Peternakan

7) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Peran pemerintah Kabupaten Wonosobo cukup besar dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kegiatan Fasilitasi Kegiatan keagamaan Masyarakat, Fasilitasi panitia penyelenggara Ibadah Haji, Fasilitasi kegiatan lomba keagamaan, Apresiasi Tim MTQ Berprestasi, Fasilitasi

Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI). Fasilitas Kegiatan keagamaan Masyarakat antara lain berupa peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an, Tahun Baru Hijriyah, dan Peringatan Natal, Taraweh Keliling di 7 kecamatan, Mujahadah serta bantuan kegiatan keagamaan bagi masyarakat.

Dalam rangka memfasilitasi masyarakat Wonosobo yang akan menunaikan ibadah haji maka pemerintah menyediakan sarana transportasi untuk pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Sedangkan Fasilitas kegiatan lomba keagamaan diwujudkan dalam penyelenggaraan Lomba Masjid di tingkat kabupaten, penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pelajar di tingkat kabupaten, TCTQ MTQ pelajar dan umum, MHQ, dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) untuk persiapan maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah serta pengiriman MTQ pelajar dan umum, MHQ, STQ ke tingkat provinsi.

8) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan Peningkatan manajemen SAKIP, Evaluasi Ketatalaksanaan, Evaluasi Pelayanan Publik, Pengembangan Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara, dan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Perijinan.

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah maka dilakukan Peningkatan Manajemen SAKIP. Output dari kegiatan ini yaitu Rapat Koordinasi Tim Perumus LKJIP Bupati, Sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja 2017 dan LKJIP 2016 ke perangkat daerah, Penyusunan LKJIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2018 serta Pengadaan Sistem Aplikasi E-SAKIP. Kegiatan lainnya yaitu Pengembangan Sistem Kinerja ASN yang bertujuan untuk memfasilitasi Rapat Koordinasi antar Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS dan Tim Analisis E-Kinerja.

9) Program Penataan Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka evaluasi kelembagaan dilakukan untuk mengetahui kinerja dari masing-masing perangkat daerah setelah adanya penetapan nomenklatur baru. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya benar-benar telah sesuai dan berjalan dengan baik atau ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan dalam penyusunan kelembagaannya. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan evaluasi kelembagaan yaitu : Rapat Tim Perumusan Metode Evaluasi Kelembagaan, Sosialisasi Anjab dan ABK, FGD Evaluasi Kelembagaan, Penyusunan Peta Jabatan, Rapat

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

Koordinasi Tim Teknis dan Tim Pengarah pembentukan UPTD, Rapat Koordinasi Tim Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Perbup Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sosialisasi Perbup 25/2017 tentang pedoman koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Pengadaan Sistem Aplikasi E-Anjab ABK.

c. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan

Tabel III.F.4..2
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase penerapan SPP dan SOP pada OPD	71.01 %	70%	76,60%	109,43	○
2	Rata-rata persentase pencapaian SPM oleh OPD	80%	100%	80%	80,00	↓
3	Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP	70.90%	100%	100%	100,00	○
4	Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan unit pengaduan publik	70.90%	80%	83,30%	104,13	○
5	Rata-rata nilai integritas Pelayanan Publik OPD	B (74,18)	B	B (76,80)	100	○
6	Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN	100%	65%	100,00%	153,85	○

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian

- Tercapai Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
- Tidak tercapai Realisasi capaian 90%- 99%
- ↓ Tidak tercapai dan perlu upaya keras Realisasi capaian $\leq 90\%$

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja pada Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017 berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021 secara keseluruhan hampir memenuhi target. Dari 6 indikator, hanya 1 indikator saja yaitu rata-rata persentase pencapaian SPM oleh OPD yang belum memenuhi target capaian (80%).

Sejak tahun 2016, semua kecamatan di Kabupaten Wonosobo telah menerapkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Hal ini dilakukan untuk

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan dengan diterapkannya PATEN di semua wilayah maka kecamatan memiliki prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisinya sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari "dilayani" menjadi "melayani". Salah satu contoh penerapan paten adalah pelayanan akta kelahiran dan kematian. Melalui layanan ini masyarakat yang mengurus akta kelahiran maupun akta kematian cukup datang di kecamatan, tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, akta kelahiran dan kematian yang sudah jadi akan diantar langsung oleh petugas Kantor Pos Indonesia karena pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. Pos Indonesia telah menjalin kerjasama dalam hal layanan akta kelahiran dan kematian. Pengalihan layanan akta dari Disdukcapil ke kecamatan tersebut, merupakan salah satu bentuk inovasi layanan Paten, yang didukung penuh kantor pos. Inovasi ini memudahkan warga, selain lebih dekat juga tidak perlu keluar biaya terlalu banyak.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.F.4..3: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Wonosobo

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	9
	b. S-1	33
	c. DI-DIV	5
	d. SMA	29
	e. SMP	3
	f. SD	2
	Jumlah	81
2	Golongan	
	a. Golongan IV	5
	b. Golongan III	57
	c. Golongan II	18
	d. Golongan I	1
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	81
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	Jumlah
	b. Esselon III	0
	c. Esselon IV	25
	Staf/Fungsional Umum	56
	Jumlah	81

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.4: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Watumalang

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	0
	b. S-1	9
	c. DI-DIV	2
	d. SMA	14
	e. SMP	5
	f. SD	1
	Jumlah	31
2	Golongan	
	a. Golongan IV	2
	b. Golongan III	11
	c. Golongan II	6
	d. Golongan I	2
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	31
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	6
	Staf/Fungsional Umum	23
	Jumlah	31

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.5: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Wadaslintang

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	4
	b. S-1	3
	c. DI-DIV	2
	d. SMA	20
	e. SMP	2

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	Jumlah
	f. SD	1
	Jumlah	32
2	Golongan	
	a. Golongan IV	3
	b. Golongan III	13
	c. Golongan II	15
	d. Golongan I	1
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	32
3	Pejabat/Struktural	
	a. Eselon II	0
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	6
	Staf/Fungsional Umum	24
	Jumlah	32

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.6: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Sukoharjo

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	3
	b. S-1	3
	c. DI-DIV	1
	d. SMA	10
	e. SMP	2
	f. SD	4
	Jumlah	23
2	Golongan	
	a. Golongan IV	3
	b. Golongan III	7
	c. Golongan II	8
	d. Golongan I	5
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	23
3	Pejabat/Struktural	
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	4
	Staf/Fungsional Umum	17
	Jumlah	23

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.7: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Selomerto

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	1
	b. S-1	11
	c. DI-DIV	2
	d. SMA	23
	e. SMP	2
	f. SD	2
	Jumlah	41
2	Golongan	
	a. Golongan IV	2
	b. Golongan III	15
	c. Golongan II	22
	d. Golongan I	2
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	41
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	11
	Staf/Fungsional Umum	28
	Jumlah	41

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.8: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Sapuran

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	1
	b. S-1	6
	c. DI-DIV	3
	d. SMA	17
	e. SMP	2
	f. SD	1
	Jumlah	30
2	Golongan	
	a. Golongan IV	3
	b. Golongan III	12
	c. Golongan II	14
	d. Golongan I	1
	e. Tenaga Kontrak	-

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	Jumlah
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	30
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	6
	Staf/Fungsional Umum	22
	Jumlah	30

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.9: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Mojotengah

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	4
	b. S-1	15
	c. DI-DIV	2
	d. SMA	20
	e. SMP	1
	f. SD	-
	Jumlah	42
2	Golongan	
	a. Golongan IV	4
	b. Golongan III	25
	c. Golongan II	11
	d. Golongan I	1
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	41
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	0
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	16
	Staf/Fungsional Umum	23
	Jumlah	41

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.10: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Leksono

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	3
	b. S-1	5
	c. DI-DIV	4
	d. SMA	11
	e. SMP	1
	f. SD	1
	Jumlah	25
2	Golongan	
	a. Golongan IV	3
	b. Golongan III	10
	c. Golongan II	11
	d. Golongan I	1
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	25
3	Pejabat/Struktural	
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	7
	Staf/Fungsional Umum	16
	Jumlah	25

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.11: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Kertek

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	2
	b. S-1	10
	c. DI-DIV	3
	d. SMA	26
	e. SMP	3
	f. SD	3
	Jumlah	47
2	Golongan	
	a. Golongan IV	1
	b. Golongan III	23
	c. Golongan II	20
	d. Golongan I	3
	e. Tenaga Kontrak	-

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	Jumlah
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	47
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	0
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	11
	Staf/Fungsional Umum	35
	Jumlah	47

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.12: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Kepil

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	3
	b. S-1	9
	c. DI-DIV	0
	d. SMA	19
	e. SMP	4
	f. SD	-
	Jumlah	35
2	Golongan	
	a. Golongan IV	3
	b. Golongan III	14
	c. Golongan II	14
	d. Golongan I	4
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	35
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	8
	Staf/Fungsional Umum	25
	Jumlah	35

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.13: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Kejajar

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	2
	b. S-1	6
	c. DI-DIV	2
	d. SMA	22
	e. SMP	2
	f. SD	4
	Jumlah	38
2	Golongan	
	a. Golongan IV	2
	b. Golongan III	11
	c. Golongan II	20
	d. Golongan I	5
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	38
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	7
	Staf/Fungsional Umum	29
	Jumlah	38

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.14: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Kaliwiro

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	2
	b. S-1	6
	c. DI-DIV	1
	d. SMA	17
	e. SMP	2
	f. SD	2
	Jumlah	30
2	Golongan	
	a. Golongan IV	2
	b. Golongan III	13
	c. Golongan II	13
	d. Golongan I	2
	e. Tenaga Kontrak	-

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	Jumlah
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	30
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	0
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	6
	Staf/Fungsional Umum	22
	Jumlah	30

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.15: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Kalikajar

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	3
	b. S-1	7
	c. DI-DIV	2
	d. SMA	13
	e. SMP	1
	f. SD	2
	Jumlah	28
2	Golongan	
	a. Golongan IV	2
	b. Golongan III	13
	c. Golongan II	11
	d. Golongan I	2
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	28
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	0
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	7
	Staf/Fungsional Umum	19
	Jumlah	28

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.16: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Garung

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	3
	b. S-1	9
	c. DI-DIV	0
	d. SMA	15
	e. SMP	5
	f. SD	1
	Jumlah	33
2	Golongan	
	a. Golongan IV	1
	b. Golongan III	14
	c. Golongan II	15
	d. Golongan I	3
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	33
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	0
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	8
	Staf/Fungsional Umum	23
	Jumlah	33

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.17: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Kalibawang

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	1
	b. S-1	4
	c. DI-DIV	3
	d. SMA	10
	e. SMP	-
	f. SD	-
	Jumlah	18
2	Golongan	
	a. Golongan IV	2
	b. Golongan III	6
	c. Golongan II	10
	d. Golongan I	-
	e. Tenaga Kontrak	-

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	Jumlah
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	18
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	4
	Staf/Fungsional Umum	13
	Jumlah	18

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.18: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Sekertariat Daerah

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	23
	b. S-1	36
	c. DI-DIV	8
	d. SMA	48
	e. SMP	12
	f. SD	7
	Jumlah	134
2	Golongan	
	a. Golongan IV	20
	b. Golongan III	53
	c. Golongan II	54
	d. Golongan I	7
	e. Tenaga Kontrak	
	f. THL/GTT/PTT	
	Jumlah	134
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	3
	b. Esselon III	5
	c. Esselon IV	18
	Staf/Fungsional Umum	100
	Jumlah	134

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III. F.4.19: Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Sekertariat Dewan

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	3
	b. S-1	8
	c. DI-DIV	4
	d. SMA	11
	e. SMP	3
	f. SD	3
	Jumlah	32
2	Golongan	
	a. Golongan IV	5
	b. Golongan III	9
	c. Golongan II	13
	d. Golongan I	5
	e. Tenaga Kontrak	
	f. THL/GTT/PTT	
	Jumlah	32
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	5
	Staf/Fungsional Umum	25
	Jumlah	32

Sumber: BKD Kab. Wonosobo, 2018

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

**Tabel III.F.4.20
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Garung**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP	6.692.718.175,07
01	Tanah	27.633.000,00
02	Peralatan dan Mesin	933.149.271,07
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	527.246.810,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	365.270.461,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	30.347.000,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	1.696.075.810,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	Bangunan Gedung	1.075.916.810,00
	Monumen	620.159.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.035.860.094,00
	Jalan dan Jembatan	3.147.722.694,00
	Bangunan Air/Irigasi	303.386.400,00
	Instalasi	584.751.000,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.21
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kalibawang

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
A	ASET TETAP	7.109.426.494,00
1	Tanah	690.965.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.113.709.036,00
02	Alat-alat Besar	10.285.000,00
03	Alat-alat Angkutan	460.634.210,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.997.500,00
05	Alat Pertanian	0,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	510.632.365,00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	121.679.961,00
08	Alat-alat Kedokteran	0,00
09	Alat Laboratorium	0,00
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	7.480.000,00
3	Gedung dan Bangunan	1.890.965.408,00
11	Bangunan Gedung	1.890.965.408,00
12	Monumen	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.410.787.350,00
13	Jalan dan Jembatan	2.096.861.250,00
14	Bangunan Air/Irigasi	437.021.250,00
15	Instalasi	455.906.600,00
16	Jaringan	420.998.250,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.999.700,00
17	Buku dan Perpustakaan	0,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
18	Barang Bercorak Kebudayaan	2.999.700,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
B	ASET LAINNYA	0,00
7	Aset Lainnya	0,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.22
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Wadaslintang

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	11.163.004.276,00
01	Tanah	840.592.951,00
02	Peralatan dan Mesin	1.324.599.076,00
	Alat-alat Besar	24.225.000,00
	Alat-alat Angkutan	648.130.010,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	614.441.366,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	37.802.700,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	1.872.160.000,00
	Bangunan Gedung	1.872.160.000,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.125.652.249,00
	Jalan dan Jembatan	4.528.893.249,00
	Bangunan Air/Irigasi	1.851.060.000,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	745.699.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.23
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kaliwiro

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	10.928.744.472,07
01	Tanah	230.838.250,00
02	Peralatan dan Mesin	1.292.546.786,07
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	659.476.410,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	566.646.312,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	56.139.064,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	2.394.728.350,00
	Bangunan Gedung	2.394.728.350,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.010.631.086,00
	Jalan dan Jembatan	5.838.375.536,00
	Bangunan Air/Irigasi	665.763.000,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	506.492.550,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.24
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kertek

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	16.026.811.751,00
01	Tanah	2.391.391.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.334.218.167,00
	Alat-alat Besar	24.288.000,00
	Alat-alat Angkutan	631.964.810,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	641.428.911,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	36.536.446,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	3.651.337.491,00
	Bangunan Gedung	3.452.053.491,00
	Monumen	199.284.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.643.171.093,00
	Jalan dan Jembatan	6.314.200.323,00
	Bangunan Air/Irigasi	1.189.678.000,00
	Instalasi	914.314.770,00
	Jaringan	224.978.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	6.694.000,00
	Buku dan Perpustakaan	1.700.000,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	4.994.000,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.25
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Leksono

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	7.409.161.826,07
01	Tanah	258.340.683,00
02	Peralatan dan Mesin	955.934.720,07
	Alat-alat Besar	10.285.000,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	Alat-alat Angkutan	528.435.210,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.300.000,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	360.047.018,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	50.379.492,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	4.488.000,00
03	Gedung dan Bangunan	816.424.183,00
	Bangunan Gedung	718.260.882,00
	Monumen	98.163.301,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.353.079.969,00
	Jalan dan Jembatan	2.108.871.969,00
	Bangunan Air/Irigasi	2.860.420.000,00
	Instalasi	383.788.000,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	25.382.271,00
	Buku dan Perpustakaan	14.815.000,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	10.567.271,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.26
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Watumalang

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	8.782.403.365,00
01	Tanah	166.291.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.025.821.906,00
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	550.318.410,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	429.199.996,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	36.018.500,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	1.893.986.000,00
	Bangunan Gedung	1.893.986.000,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.696.304.459,00
	Jalan dan Jembatan	4.217.222.359,00
	Bangunan Air/Irigasi	892.838.100,00
	Instalasi	586.244.000,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.27
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Sapuran

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	12.865.638.804,92
01	Tanah	1.068.538.424,00
02	Peralatan dan Mesin	1.142.365.810,92
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	566.448.100,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	520.302.275,85
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	45.330.435,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	2.004.019.579,00
	Bangunan Gedung	2.004.019.579,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.714.103.775,00
	Jalan dan Jembatan	6.287.192.475,00
	Bangunan Air/Irigasi	309.424.950,00
	Instalasi	640.492.050,00
	Jaringan	476.994.300,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
05	Aset Tetap Lainnya	1.310.000,00
	Buku dan Perpustakaan	1.245.000,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	65.000,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	935.301.216,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.28
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Mojotengah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	11.792.622.578,07
01	Tanah	24.000.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.086.751.651,07
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	589.820.010,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	432.858.479,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	53.788.162,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	2.063.371.980,00
	Bangunan Gedung	1.946.859.980,00
	Monumen	116.512.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.618.498.947,00
	Jalan dan Jembatan	7.108.945.947,00
	Bangunan Air/Irigasi	1.121.774.353,00
	Instalasi	387.778.647,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak	0,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	Berat/Hilang/Lainnya	
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.29
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Wonosobo

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	32.250.123.846,00
01	Tanah	1.999.149.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.079.012.976,00
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	427.957.610,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	595.845.966,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	44.924.400,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	6.268.544.600,00
	Bangunan Gedung	6.268.544.600,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.699.900.450,00
	Jalan dan Jembatan	17.191.184.650,00
	Bangunan Air/Irigasi	5.220.320.800,00
	Instalasi	288.395.000,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	203.516.820,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak	0,00
	Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.30
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kepil

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	11.584.074.240,51
01	Tanah	61.750.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.293.820.626,07
	Alat-alat Besar	28.408.277,00
	Alat-alat Angkutan	687.336.410,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	530.743.439,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	39.412.500,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	7.920.000,00
03	Gedung dan Bangunan	2.084.438.587,00
	Bangunan Gedung	2.084.438.587,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.144.065.027,44
	Jalan dan Jembatan	6.260.183.977,44
	Bangunan Air/Irigasi	951.069.000,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	932.812.050,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.31
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kejajar

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	10.050.685.961,07
01	Tanah	570.000.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.139.395.656,07
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	552.898.410,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.878.500,00
	Alat Pertanian	2.986.500,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.858.746,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	57.561.000,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	9.927.500,00
03	Gedung dan Bangunan	3.441.351.670,00
	Bangunan Gedung	3.293.821.670,00
	Monumen	147.530.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.899.938.635,00
	Jalan dan Jembatan	4.800.648.160,00
	Bangunan Air/Irigasi	99.290.475,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.31
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Selomerto

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	12.037.567.209,36
01	Tanah	0,00
02	Peralatan dan Mesin	1.442.487.394,36

III.F.4. **Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	638.349.610,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	744.150.432,36
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	49.702.352,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	2.418.963.233,00
	Bangunan Gedung	1.819.925.898,00
	Monumen	599.037.335,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.078.309.082,00
	Jalan dan Jembatan	6.259.476.582,00
	Bangunan Air/Irigasi	1.372.169.800,00
	Instalasi	375.362.700,00
	Jaringan	71.300.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.807.500,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.32
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kalikajar

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	13.247.701.525,07
01	Tanah	0,00
02	Peralatan dan Mesin	1.182.387.314,07
	Alat-alat Besar	10.285.000,00
	Alat-alat Angkutan	612.513.210,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	528.493.691,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	31.095.413,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	1.380.302.773,00
	Bangunan Gedung	1.365.552.773,00
	Monumen	14.750.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.684.201.438,00
	Jalan dan Jembatan	6.882.341.998,00
	Bangunan Air/Irigasi	2.310.512.990,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	1.491.346.450,00
05	Aset Tetap Lainnya	810.000,00
	Buku dan Perpustakaan	810.000,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

Tabel III.F.4.33
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Sukoharjo

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	12.400.302.716,07
01	Tanah	200.000.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.119.617.266,07
	Alat-alat Besar	12.985.000,00
	Alat-alat Angkutan	619.781.610,07
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	423.290.656,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	58.588.000,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	4.972.000,00
03	Gedung dan Bangunan	6.715.164.400,00
	Bangunan Gedung	6.615.904.400,00
	Monumen	99.260.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.365.521.050,00
	Jalan dan Jembatan	3.580.929.050,00
	Bangunan Air/Irigasi	159.559.000,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	625.033.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.F.4.4

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Masalah	Solusi
1.	Belum terbitnya regulasi yang mengatur kelembagaan terkait urusan kesehatan (pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan), urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik dan penanggulangan bencana) berdampak pada kelembagaan perangkat daerah yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan regulasi kelembagaan dimaksud untuk kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
2.	Masih terdapat "overlapping" pelaksanaan urusan pemerintahan	Review Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Perangkat Daerah.
3	Belum tersedianya dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan struktur Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati akan berdampak pada belum bisa dilaksanakannya Evaluasi Jabatan. Evaluasi Jabatan diperlukan untuk menentukan peringkat jabatan yang akan digunakan sebagai dasar penentuan besaran tunjangan kinerja.	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagai subyek pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

III.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Masalah	Solusi
4	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) belum optimal yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, predikat Kabupaten Wonosobo masih CC.	Sinergitas Bappeda, BPPKAD, Bagian Pengendalian Pembangunan, Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam menjaga siklus SAKIP dengan mengintegrasikan system perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pengawasan.
5	Belum maksimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Perangkat Daerah.	Harus dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai dokumen SOP yang disusun oleh Perangkat Daerah dan sejauh mana implementasi dari SOP tersebut.
6	Inkonsistensi indikator, tingkat kesulitan indikator yang berbeda, dan indikator yang belum operasional dalam pencapaian SPM	Kesepakatan antara pelaksana SPM dengan perangkat daerah pendukung SPM. Perlu dirumuskan kembali, dan disepakati konsistensi indikator, menggunakan indikator yang mana, di antara peraturan yang dirujuk.
7	Belum maksimalnya pelayanan yang sudah didelegasikan di Kecamatan	Perlunya pendampingan oleh perangkat daerah terkait dan memperkaya inovasi pelayanan yang lebih mendekatkan ke masyarakat berdasarkan tupoksi dan kewenangan.